**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DENGAN PERANG SARUNG**

**(Studi Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Slw)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**WISNU SAPUTRA NPM 5120600132**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**







# Abstrak

Perang sarung awalnya merupakan kegiatan yang dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Namun saat ini, perang sarung digunakan sebagai aktivitas tawuran antar remaja.

Penelitian ini bertujuan : (1) mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung; (2) mengkaji faktor penghambat yang dihadapi Polres Tegal dalam mencegah tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan pendekatan normatif dengan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa para pelaku tindak pidana pengeroyokan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun sampai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Faktor penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam rangka mencegah tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung antara lain : kurangnya respon dari siswa sekolah ketika dilakukan sosialisasi, jadwal penyuluhan yang berbenturan dengan kalender akademik di sekolah, para siswa lebih takut dengan ketua kelompok perkumpulan, keberadaan orang tua siswa yang diluar.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

### Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemidanaan, Tindak Pidana Pengeroyokan

## Abstract

*Sarong war was originally an activity carried out just for fun. However, currently, sarong wars are used as brawling activities between teenagers.*

*This research aims to: (1) describe law enforcement against criminal acts of beatings using sarong warfare; (2) examine the inhibiting factors faced by the Tegal Police in preventing criminal acts of beatings with sarong wars. This type of research is library research using a normative approach with interactive analysis.*

*The results of the research show that the perpetrators of the crime of beatings were sentenced to prison for 1 (one) year to 1 (one) year and 10 (ten) months. Factors inhibiting the efforts made by the Tegal Police to prevent criminal acts of beatings with sarong wars include: lack of response from school students when socialization is carried out, counseling schedules that conflict with the academic calendar at school, students are more afraid of the heads of association groups, the existence of parents of students outside.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: Law Enforcement, Punishment, Crime of Attacking***

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Koriyah dan bapak Gito, kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
2. Ibu Romsah dan bapak Rosid, nenek dan kakek penulis yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
3. Bapak Rasjo, paman penulis yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
4. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Strata 1 dengan tepat waktu.
6. Saudara kandung penulis, Mohamad Arju Analil Farkhi yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan terbaiknya kepada penulis selama menempuh studi Strata 1 ini.
7. Saudari Apriliyani Nur Khasanah, S.E. yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan terbaiknya kepada penulis selama menempuh studi Strata 1 ini.
8. Rekan-rekan penulis Jourdani Bima Geofani, S.H.; Wisnu Aji Pangestu, S.H.; Wahyu Eka Budianto, S.H. yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis dikala suka maupun duka.
9. Bapak Ali Hupron, S.H. yang telah memberikan do’a dan dukungan terbaiknya selama penulis menempuh studi Strata 1, serta berkenan membimbing dan mengayomi penulis selama melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata.

# MOTTO

*“Cara untuk memulai ialah berhenti berbicara dan mulai melakukannya. Banyak orang punya ide, tapi hanya sedikit orang yang memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap ide-ide tersebut. Bukan besok. Tidak pun minggu depan. Tapi lakukanlah hari ini.”*

*( Wisnu Saputra )*

فا إنا معال أسرى يسرا

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5)

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam, yang membawa rahmat kepada seluruh alam .

Penyusunan skripsi ini selain atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr.Soesi Idayanti, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu selviany, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Kus Rizkianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata I. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan penuh kesabaran dan ramah.
9. Ibu koriyah dan Bapak Gito, kedua orang tua yang selalu memberikan do’a dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penulis selama menempuh studi.
10. Rekan-rekan penulis, serta semua pihak yang memberikan motivasi selama menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 31 Januari 2024

**Penulis**

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** .................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii

[HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... iv](#_TOC_250014)

[**ABSTRAK** ................................................................................................... v](#_TOC_250013)

[**ABSTRACT** ................................................................................................. vi](#_TOC_250012)

[HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. vii](#_TOC_250011)

[**MOTTO** ....................................................................................................... ix](#_TOC_250010)

[**KATA PENGANTAR** ................................................................................. x](#_TOC_250009)

[**DAFTAR ISI** ................................................................................................ xii](#_TOC_250008)

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250007)

* 1. Latar Belakang .............................................................. 1
	2. [Rumusan Masalah ......................................................... 6](#_TOC_250006)
	3. [Tujuan Penelitian .......................................................... 6](#_TOC_250005)
	4. [Urgensi Penelitian ......................................................... 6](#_TOC_250004)
	5. [Tinjauan Pustaka ........................................................... 7](#_TOC_250003)
	6. [Metode Penelitian .......................................................... 9](#_TOC_250002)
	7. [Sistematika Penulisan ................................................... 13](#_TOC_250001)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL](#_TOC_250000)

1. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana ................. 14
2. Dafinisi dan Ruang Lingkup Pemidanaan. .................... 23
3. Definisi dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pengeroyokan 36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dengan Perang Sarung 46
2. Faktor Penghambat Terhadap Upaya yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pengeroyokan dengan Perang Sarung 61

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan ..................................................................... 71
2. Saran ................................................................................ 72

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………... 73

LAMPIRAN……………………………………………………………….. 81

### BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Perang sarung seringkali dilakukan secara berkelompok di Desa atau wilayah tertentu. Semuanya terjadi semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa memikirkan balas dendam. Seiring berjalannya waktu, aktifitas ini sering disalahgunakan oleh para kelompok remaja. Generasi muda, khususnya remaja mengubah kegiatan tarung sarung menjadi tawuran di bulan Ramadan pada saat malam hari saat orang-orang sedang melaksanakan sholat tarawih. Hal ini terlihat dari cukup maraknya fenomena pertikaian sarung dilakukan generasi muda di beberapa wilayah-wilayah Indonesia.1

Kegiatan perang sarung berujung pada tawuran dan perkelahian antar kelompok. Kegiatan ini sudah mulai masuk di kalangan remaja wilayah Tegal sejak tahun 2020. Saat ini perang sarung menjadi hal yang tidak baik di kelompok remaja karena melibatkan bentuk aktivitas berlebihan yang bahkan meresahkan masyarakat, yang tujuanya bukan untuk bermain-main, bersenang-senang, melainkan untuk melukai atau melumpuhkan lawan. Faktanya saat ini batu atau besi dimasukan ke dalam ujung sarungnya, yang dapat menyebabkan rasa sakit bahkan cedera atau bahkan kematian jika mengenai lawan. Jika mengenai kepala atau mata, dampaknya sangat mematikan dan bisa berujung pada kematian. Kondisi ini

1 Nindi Dwi Anggini,”Perang Sarung”, [*www.hariankepri.com,*](http://www.hariankepri.com/)Tanjung Pinang, 9 April 2023, [https://www.hariankepri.com/perang-sarung/,](https://www.hariankepri.com/perang-sarung/) diakses pada 11 Oktober 2023, Pukul 21.35 wib

1

memang sangat memprihatinkan, apalagi kejadian ini sering terjadi saat bulan suci Ramadhan. Bulan Ramadhan yang sepatutnya di isikan dengan rangkaian agenda bermanfaat, namun kenyataanya mereka malah memanfaatkan guna kegiatan membahayakan keselamatan karena sarung yang digunakan dalam pertikaian itu pada ujungnya diisi beberapa benda keras, seperti batu atau kayu.

Salah satunya kejadian tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung diwilayah Indonesia yaitu terjadi di wilayah Tanggerang yang dimana terjadi di Jalan Raya Salembaran didesa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Terjadi juga pada wilayah Cianjur dimana aksi terjadi pada hari Senin 27 Maret 2023 dini hari, kejadian ini terjadi di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Haurwangi. Adapun peristiwa perang sarung telah masuk di wilayah Tegal dimana atas peristiwa tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang, terjadi di wilayah Kabupaten Tegal yaitu terjadi di wilayah Kecamatan Pagerbarang tepatnya terjadi didesa Randusari pada hari Senin,10 April 2023 pada pukul 22.00 Wib di bulan Ramadhan dan peristiwa tersebut berakibat menghilangkan nyawa seseorang pelajar berinisial (TS).

Peristiwa perang sarung juga terjadi di wilayah Tegal yaitu tepatnya di daerah Slawi, peristiwa perang sarung ini terjadi diantara kedua kelompok remaja Procot dan Kagok, dan terjadi di depan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

3 Slawi Kabupaten Tegal. Peristiwa tersebut bermula dari kesepakatan dua kelompok pemuda dari Procot dan Kagok untuk melakukan perang sarung. Setelah itu, kedua kelompok tersebut terlibat perang sarung dan nyawa korban tidak dapat

terselamatkan akibat insiden perang sarung tersebut.2 Sesuai dengan Pasal 170 KUHP merupakan akibat dari tindakan kekerasan yang diupayakan secara bersamaan. Pasal 170 ayat (1) mengancam pelaku tindakan pidana pengeroyokan bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan dimuka umum kepada orang juga barang dipidana penjara paling lama maksimal 5 tahun 6 bulan, kemudian dalam ayat (2) pelaku di pidana paling lama 7 tahun jika dengan sengaja merusak harta benda juga menimbulkan luka badan akibat kekerasan nya. Namun apabila korban terluka berat disebabkan oleh kekerasan, ancaman hukuman maksimalnya adalah sembilan tahun penjara, dan pidana maksimal bagi mereka yang menyebabkan kematian orang lain karena kekerasan adalah 12 tahun.3

Permasalahan yang saat ini menjadi perhatian publik mengenai penegakan hukum antara lain kolusi, bisnis gelap peradilan, serta bentuk disfungsional lainya di bidang litigasi dan penegakan norma hukum.4 Adapun di Indonesia, banyak kejadian terkait penegakan hukum pidana terjadi di masyarakat. Banyaknya Tindakan aparat penegak hukum yang melanggar aturan hukum, mulai dari agenda menyelidiki, menyidik, penututan terdakwa, pemeriksaan sidang pengadilan ataupun dalam melaksanaan putusan. Penegakan kebijakan pidana di Indonesia seringkali tidak wajar, komplekss serta disruptif. Aturan hukum pidana sering kali

2 Desta Leila Kartika, “Tawuran Sarung Maut”, Tribunjateng.com,12 April 2022, [https://jateng.tribunnews.com/2022/04/12/tawuran-sarung-maut-kronologi-korban-tewas-tawuran-](https://jateng.tribunnews.com/2022/04/12/tawuran-sarung-maut-kronologi-korban-tewas-tawuran-sarung-pemuda-procot-dan-kagok-slawi-tegal?page=2) [sarung-pemuda-procot-dan-kagok-slawi-tegal?Page=2,](https://jateng.tribunnews.com/2022/04/12/tawuran-sarung-maut-kronologi-korban-tewas-tawuran-sarung-pemuda-procot-dan-kagok-slawi-tegal?page=2) diakses pada 13 Oktober 2023, Pukul 19.49 wib

3 Kartika Law Firm, *“Isi Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan dan Apa Ancaman Pidananya?”, Kartikanews*.com,13 Desember 2018, [http://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-](http://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya/) [pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya/,](http://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya/) diakses pada 31 Oktober 2023, Pukul 12.48 wib

4 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2018, 5, hlm 5.

<https://play.google.com/store/books/details?id=AeLJDwAAQBAJ>

menyimpang dari saat mengadili pelaku kejahatan, hingga orang yang sepatutnya tidak dipersalahkan bisa menjadi tersangka, dan seballiknya orang yang seharusnya bersalah bisa berakhir keluar dari jeratan hukum.5 Tindakan pidana pengeroyokan ialah upaya yang diperbuat lebih dari 2 orang.

Pengeroyokan ialah tindakan yang sangat memalukan serta tidak pantas dilakukan oleh siapapun, namun belakangan ini pengeroyokan antar kelompok semakin erat kaitanya dengan remaja sehingga mengakibatkan terjadinya kasus pengeroyokan. Saat ini isu pengeroyokan membawa keresahan masyarakat. Perselisihan opini, ras, suku mengakibatkan konflik, pada komunitas pemuda dimana anak bertransformasi dari masa anak-anak menjadi dewasa, yang mana cenderung terdapat sifat labil dalam menyelesaikan suatu problematika. Menurut sosiologis, segmentasi muda yang tengah berproses mencari jati diri umumnya sangat rentan terhadap pengaruh luar, mereka mudah terpengaruh dan mereka merasa kesulitan untuk menentukan tokoh panutannya.

Permusuhan diawali dengan sesuatu yang tidak berarti. Perselisihan sepele ini dapat berwujud saling ejek atau permasalahan berebut seorang yang menjadi idaman mereka. Penyulut lainnya adalah dendam yang biasanya disertai dalih solidaritas yang kuat, menolak perlakuan dari seseorang yang diduga telah merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.

5 Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014, Hlm 1

Pengeroyokan tidak lagi menjadi hal asing dalam aktivitas sosial. Begitu sering terjadinya tindakan pidana pengeroyokan, hingga masyarakatpun tidak heran pula ketika mendapatinya. Kriminalitas ialah fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Memahami suatu perkara pidana dengan pengalaman yang berbeda-beda tidak semata-mata hanya sekedar memahami tindak pidan saja.6

Peristiwa tindak pidana pengeroyokan saat ini merupakan masalah yang belum terselesaikan, pengeroyokan menjadi salah satu masalah sosial yang tergolong kriminalitas. Pengeroyokan ialah salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di negara ini dan semakin memprihatinkan. Sejumlah besar kejahatan ini melibatkan pelakunya yang menggunakan metode baru dan sangat brutal dalam melakukan tindakannya yang mungkin digunakan untuk dapat menyamarkan perbuatan pelaku dari aparat kepolisian. Menghindari terjadinya tindak pidana seperti ini, maka penyidik harus mempunyai kemampuan yang baik dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Tingkat kejahatan di wilayah Indonesia semakin tinggi terutama untuk tindakan kejahatan tindak pidana pengeroyokan, dimana pengeroyokan ini tidak hanya terjadi pada seseorang yang tidak disukai saja, melainkan bisa terjadi kepada siapapun.

6 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2022, hlm 1.

### Rumusan Masalah

* 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung ?
	2. Apa faktor penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam rangka mencegah tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung ?

### Tujuan Penelitian

* 1. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung.
	2. Untuk mengkaji faktor penghambat yang dihadapi Polres Tegal dalam mencegah tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung.

### Urgensi Penelitian

* 1. Penelitian ini penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pemidanaan. Tradisi perang sarung atau kebudayaan ini yang ada dimasyarakat terkadang juga bisa berdampak menimbulkan terjadinya tindak pidana seperti yang penulis terangkan dalam penelitian tersebut yaitu tradisi perang sarung bisa berujung mengilangkan nyawa seseorang.
	2. Penelitian ini penting karena dengan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi para peneliti serta pihak yang berkonsentrasi dalam penegakan di bidang hukum dalam tindak pidana pengeroyokan.
	3. Penelitian ini juga penting karena dapat memberikan manfaat bagi kepolisian yaitu untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana

pengeroyokan serta manfaat tambah untuk dijadikan bahan acuan, bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi yang menguntungkan dalam rangka memutus rantai kejahatan tindak pidana pengeroyokan.

### Tinjauan Pustaka

* 1. Vivi Kartika Sari, “Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota”. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan membahas proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan kepolisian terhadap anak tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yangg diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.7 Persamaan dalam penelitian tersebut adalah ketersamaanya membahas tentang penegakan hukum dalam tindakan pidana pengeroyokan. Sedangkan perbedaannya yang akan penulis teliti adalah penulis mengkaji kendala yang dihadapi terhadap upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung.

7 Vivi Kartika Sari, “Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota”. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Pekanbaru: 2016, https://media.neliti.com/media/publications/186474-ID-penyidikan-tindak-pidana-pengeroyokan- ol.pdf

* 1. Anggreana Elisabeth Roria Sormin, “Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian yang dilakukan oleh Anak”. Tesis ini membahas mengenai kewenangan hakim menurut Undang-Undang dan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.8 Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana Pengeroyokan. Sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah penulis mengkaji kendala yang dihadapi terhadap upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung.
	2. Nandyar Astari Putri, “Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepolisian dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan mendeskripsikan pengimplementasi kebijakan kepolisian untuk mencegah terjadinya pengeroyokan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

8 Anggreana Elisabeth Roria Sormin, “Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian yang dilakukan oleh Anak”. Tesis Magister Ilmu Hukum Medan Area : 2023, https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/19732/1/201803018%20%20Anggreana%2 0Elisabeth%20Roria%20Sormin%20-%20Fulltext.pdf

meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.9 Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai Penegakan hukum dalam tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan perbedaan yang akan penulis teliti adalah penulis mengkaji kendala yang dihadapi terhadap upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan dengan perang sarung.

### Metode Penelitian

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder10. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak berupa data sekunder yang merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan, prinsip hukum, teori hukum, karya dan doktrin/ pendapat para ahli hukum.

* 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan

9 Nandyar Astari Putri, “Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Magelang : 2020, [http://eprintslib.ummgl.ac.id/2531/1/16.0201.0101\_BAB%20I\_BAB%20II\_BAB%20III\_BAB%2](http://eprintslib.ummgl.ac.id/2531/1/16.0201.0101_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%252) 0V\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

10 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram : Tim Mataram University Press, hlm 47

lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.11 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penulis juga akan mencari peraturan- peraturan hukum perundang-undangan mengenai hal-hal pengeroyokan.

* 1. Data Penelitian

Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti Undang- Undang, buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.12 Penelitian ini menggunakan data sekunder karena untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan data melalui buku -buku, file dan narasumber yang terkait dalam penelitian. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

* + 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang sifatnya mengikat, yakni :

* + - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
			2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
			3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
		1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli

11 Ibid, hlm 48

12 Ibid, hlm 61

sarjana yang berupa :

* + - 1. Penelitian terdahulu mengenai topik tindak pidana pengeroyokan.
			2. Jurnal dan artikel mengenai tindak pidana pengeroyokan.
			3. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana.
		1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.13 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan karena mencari dokumen-dokumen yang sudah ada secara online.

* 1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Metode analisis interaktif adalah teknik analisis data secara sistematis dengan terus menghubungkan komponen-komponen analisis data hingga diperoleh data lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107

karena teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.14

Metode analisis data interaktif bermakna komponen yang selalu berinteraktif dan dilihat dari data yang paling penting sampai dengan data yang kurang penting selama penelitian berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk menyajikan data dan memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Terdapat tiga macam analisis data interaktif yaitu yang pertama, kondensasi data yaitu proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi- materi empiris. Kedua, penyajian data yaitu deskripsi kata-kata, berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

Semuanya dirancang guna menggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Adapun yang terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan yang didalamnya tertuang makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan keseluruhan yang merupakan keabsahannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.15

14 Annisa Widya Davita, “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, Al Powered Planning, [https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data,](https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data) diakses Pada 20 Oktober 2023, Pukul 23.20 wib

15 Lukman Ahmad Irfan, “Analisis Data Interaktif Miles, Huberman, Saldana 2014”, *Youtube* 1 Desember 2020: <https://youtu.be/rEURjoCCM7I?si=6evx3TDNe2C6mEvC> diakses pada 21

Oktober 2023, Pukul 20.00 wib

### Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan dalam penulisan yaitu :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini mendeskripsikan tentang ruang lingkup tindak pidana dan ruang lingkup tindak pidana pengeroyokan, serta pemidanaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah di olah, dianalisis dan tafsirkan berdasarkan rumusan masalah yang terdiri atas bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung dan apa faktor penghambat terhadap upaya yang dilakukan oleh Polres Tegal dalam rangka mencegah tindak pidana pengeroyokan dengan perang sarung.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penegasan semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah.

### BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**
	1. Definisi Tindak Pidana

Tindakan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit*. Tindak pidana dalam literatur sebagai delik, sedangkan pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindakan pidana atau kasus pidana. Perbuatan melanggar hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang bisa di hukum ataupun tindakan yang dapat dipidana.16

Pendapat sebagian para ahlinya yaitu yang pertama Moeljatno menyatakan tindakan pidana ialah suatu upaya yang dilarang oleh sesuatu aturan materil, serta pantangan ini dibersamai diancam atau sanksi yang berupa hukuman tertentu, bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Tindakan pidana merupakan perbuatan yang dibatasi oleh asas-asas yang sah serta diancam pidana, bahwa pantangan diterapkan pada sesuatu tindakan, khususnya suatu keadaan ataupun

16 Fitri Wahyuni*, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tanggerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 1. https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indones ia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf.

14

peristiwa yang disebabkan oleh cara berperilaku seseorang, namun pidananya ditunjukan pada individu yang meyebabkan peristiwa tersebut. Larangan serta sanksi pidana harus ada keterkaitan dikarenakan antara peristiwa dan orang yang menyebabkan peristiwa itu juga mempunyai keterkaitan juga.17

Berdasarkan Simons, menjelaskan bahwasannya tindakan pidana merupakan kelakuan (*handeling)* yang di ancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum dan keterkaitan dengan kelalaian yang dilangsungkan oleh orang yang mampu tanggung jawab. Adapun Van Hamels juga menyatakan tindakan pidana ialah tindakan yang melanggar hukum dan bisa di hukum *(strafwaarding)* yang dilakukan seseorang karena kesalahan. Tidak sama dengannya antara Simons serta Van Hamel yang berpendapat bahwasanya tindakan dalam tindak pidana hanyalah sekedar tingkah laku, Muljatno lebih memahami bahwa perbuatan merupakan tingkah laku dan peristiwa, bukan tingkah laku saja. Hal ini tidak sama dengan tindak pidana yang mencakup arti perbuatan pidana dan kesalahan. 18

* 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua teori dalam hukum pidana tentang komponen tindakan pidana. Komponen pertama disebut dengan pendirian ataupun aliran monistis, sebaliknya pendirian ataupun aliran keduanya merupakan

17 Suyanto*, Pengantar Hukum Pidana,* Sleman: Budi Utama, 2018, hlm.80. [http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf.](http://elibs.unigres.ac.id/564/1/buku%20pengantar%20hukum%20pidana-revcompressed.pdf)

18 Ibid.

pendirian atau aliran dualistis. Aliran monistis adalah aliran atau pandangan yang menggabungkan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam aliran monistik, ketika mempertimbangkan apakah seseorang mungkin melakukan kejahatan, penting untuk mempertimbangkan apakah orang tersebut dapat bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. Jika tidak bisa dimintai pertanggungjawaban maka tidak dapat di pidana. Aliran monistis memandang bahwa seluruh ketentuan untuk terjadinya perbuatan pidana ialah sifat dari perbuatan.

Aliran selanjutnya yaitu dualistis merupakan pemikiran yang membedakan antara komponen pertanggungjawaban pidana serta tindakan pidana. Moeljatno membedakan antara komponen tindakan pidana dan komponen pertanggungjawaban pidana. Tindakan kriminal hendaknya mencakup komponen nyata atau fakta oleh tindakan terhadap perlakuan dan akibat selanjutnya akan menimbulkan peristiwa-peristiwa di dunia nyata.19

Menurut Simons yang menganut pendirian atau aliran monistis, unsur pertama suatu kejahatan adalah tindakan manusia *(menselijk handelingen), handlling* artinya tidak saja *(enndoen)* tingkah laku, namun *(ennnalatten)* yang berakibat, unsur kedua yaitu tindakan merupakan tindakan yang melarang serta dapat ancaman pidana oleh Undang- Undang, unsur ketiga yaitu tindakan dapat dilaksanakan oleh seorang

19 Fitri Wahyuni, Loc.cit.

yang dapat dimintai pertanggung jawaban, artinya yaitu orang yang dapat dipersalahkan atas perbuatan itu.20 Menurut pendapat Simons dapat dibedakan lagi menjadi unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif suatu kejahatan mencakup perbuatan seseorang, akibat tindakan yang terlihat, serta dalam beberapa hal kondisi khusus yang melingkupi tindakan tersebut, sebagaimana di muka umum *(openbaar)* Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur subyektif sesuatu tindakan pidana meliputi seorang yang mampu tanggung jawab serta terdapat kesalahan (dollus ataupun cullpa).21

Berdasarkan Moeljatno yang berpandangan dualistis, unsur kejahatan atau perbuatan pidana yaitu tindakan (perbuatan serta konsekuensi). Kejadian ataupun kondisi yang menyertai tingkah laku, kondisi tambahan yang memperberat pidana, komponen melawan hukum yang obyektif, komponen melawan hukum yang subyektif. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Sudarto, komponen pidananya menurut Moeljatno itu disederhanakan, pertama yaitu tindakan, memenuhi dalil Undang-Undang (syarat formal), serta mempunyai sifat melawan hukum (syarat material).

* 1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindakan pidana bisa dibedakan berdasarkan kriteria khusus, berdasarkan sistem hukum pidana, di bedakan antara kriminal yang

20 Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 42. [http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/2154.](http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/2154)

21 Ibid., hlm. 44.

terdapat didalam buku 2 serta pelanggaran yang terdapat dalam buku 3. Hal yang membedakan antara kriminal serta pelanggaran ialah bentuk pelanggaran tidak berat dari pada kriminal. Sebagaimana ancaman tindakan pelanggaran dengan pidana kurungan dan denda, berbeda dengan tindakan kejahatan yang dominan ancamanya yaitu pidana penjara.22

kriteria lainnya untuk dapat dibedakan antara kriminal serta pelanggaran adalah bahwa kriminal ialah kejahatan yang melanggar kepentingan norma serta mengandung risiko yang nyata, sedangkan pelanggaran hanya mengandung risiko yang abstrak. Secara kuantitatif, lembaga legislatif membedakan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan Pasal 5 KUHP yang di Indonesia, hanya diberlakukan terhadap tindakan yang merupakan tindak pidana. Jika seseorang penduduk Negara Indonesia melakukan tindakan pidana di luar Negeri yang tergolong tindakan pidana di Indonesia, maka tidak perlu diupayakan penuntutan.

Berdasarkan perumusanya membedakan antara tindakan pidana formiil serta tindakan pidana materiil. Tindakan pidana formiil merupakan tindakan pidana yang menjelaskan sedemikian rupa kemudian menimbulkan kesan bahwasanya hakikat larangan yang dijelaskan itu ialah pelaksanaan sesuatu tindakan tertentu. Rumusan tindakan pidana formil tidak perlu munculnya akibat khusus dari tindakan itu, melainkan hanya perbuaatan itu saja sebagai prasyarat selesainya tindak pidana itu.

22 Fitri Wahyuni. Loc.cit.

Menurut jenis kesalahan dapat dibedakannya antara tindakan pidana berencana (dollus) serta tindakan pidana yang tidak dengan berencana (cullpa). Tindakan pidana berencana merupakan tindakan pidana yang didalam rumusan diupayakan dengan sengaja ataupun berisi unsur berencana. Sebaliknya tindakan pidana dengan tidak berencana merupakan tindakan pidana yang rumusannya berisi unsur kelalaian.23

Menurut jenis kejahatanya, bisa dibedakannya lagi antara kejahatan tindakan pidana aktif ataupun positif serta kejahatan tindakan pidana pasif ataupun negatif. kriminal aktif merupakan kejahatan yang tindakanya berbentuk tindakan aktif, tindakan aktif merupakan tindakan yang dalam pelaksanaanya memerlukan gerakan tubuh seseorang yang melakukan tindakan itu. Tindakan ini terhadap seseorang yang melanggar pantangan tersebut meliputi tindakan pidana formal dan substantif.

Mayoritas tindakan pidana didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu kejahatan tindakan pidana aktif. Tindakan pidana pasif juga terdapat dua jenis yaitu terdiri dari tindakan pidana pasif murni dan tindakan pidana pasif yang tidak murni. Tindakan pidana pasif murni merupakan kejahatan tindakan pidana yang dijelaskan secara formal ataupun tindakan pidana yang pada asalnya hanyalah unsur tindakanya merupakan tindakan pasif. Tindakan pidana pasif yang

23 I Kethut Merta, et al., Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Udayana, 2016,https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\_pendidikan\_1\_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793ee da.pdf.

tidaklah murni ialah tindakan pidana yang saat asalnya berupa tindakan pidana positiif, namun bisa diupayakan melalui cara tidak berbuat aktif, ataupun tindakan pidana yang mengandung sesuatu konsekuensi terlarang, namun diupayakan dengan tidak melakukan ataupun membiarkan hingga akibat itu benar terjadi.

Menurut waktu serta lamanya kejahatan tindak pidana itu dilakukan, bahwa membedakan antara tindakan pidana yang terjadi ketika itu serta tindakan pidana berlangsung selama jangka waktu yang tidak singkat, yang berjalan tidak singkat atau berlaku tanpa henti. Tindakan pidana ini dirancang untuk dilakukan dalam waktu cepat dan dikenal dengan sebutan *afflopende dellicten.* sedangkan terdapat pula tindakan pidana yang dirancangkan sedemikian rupa hingga unsur tindakan pidananya tetap berlaku lama, yaitu kejahatan tetap berlangsung meskipun tindak pidana itu dilakukan yang dikenal dengan sebutan *vorrdurende deliicten.*24

Menurut sumber bisa dibedakannya lebih lanjut antara tindakan pidana umum serta tindakan pidana khusus. Tindakan pidana umum merupakan seluruh tindakan pidana yang termasuk dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengkodifikasikan hukum pidana substantif (Buku 2 serta 3). Adapun tindak pidana khusus merupakan segala kejahatan yang diluar ruang lingkup kodifikasi hukum pidana.

Berdasarkan dari sudut pandang subjeknya, cenderung dikenal sebagai kriminal komunia (kriminal siapapun bisa melakukanya) dan

kriminal propriaa (kriminal yang harus dilakukan oleh individu dengan ciri-ciri tertentu). Sebagai aturan umum, tindakan kriminal dirumuskan serta dibentuk dan berlaku untuk semua orang, yang pasti sebagian besar tindakan kriminal dilakukan dengan tujuan tersebut. Misalnya PNS (untuk tindak pidana perkantoran) dan nakhoda (untuk tindak pidana pelayaran) merupakan contoh tindakan tidak pantas yang dapat diupayakan oleh oknum tertentu.25

Perbedaan antara tindakan pidana biasa serta pengaduan pidana didasarkan pada butuh tidaknya suatu dakwaan untuk dilakukan tuntutan. kejahatan biasa di sini merupakan kejahatan tindak pidana yang pelakunya dibawa ke pengadilan tanpa perlu ada pengaduan dari orang yang bersangkutan. Tiindak aduan merupakan tuntutan pidana jika ada pengaduan terlebih dahulu oleh orang yang mempunyai hak yaitu orang yang bersangkutan atau delegasinya secara umum. Kasus tertentu, keluarga kasus tertentu, atau individu diberikan kesempatan khusus untuk mengajukan pengaduan oleh individu yang memenuhi syarat.

Tindak pidana utama atau disebut dengan kejahatan pokok, tindak pidana yang di beratkan dan diperingan tersebut didasarkan beratnya serta ringan sanksi yang diancamnya. Hal ini bisa dilihat dari seriusnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum tertentu yang dituangkan dalam struktur-struktur esensial, yang disebut dengan struktur-struktur sederhaana atau bisa juga dikatakan dengan struktur-struktur baku, dalam

struktur-struktur yang berat dan juga dalam struktur-struktur ringannya. Tindakan pidana mendefinisikan secara menyeluruh dalam bentuk dasarnya, berarti seluruh unsur diikutkan dalam keterangan, tetapi dalam bentuk yang diperkuat dan diperlemah, unsur jenis pokok tidak diulangi, hanya kriteria jenis pokok ataupun pasal pada jenis pokok saja yang dikatakan, kemudian dimasukan unsur-unsur yang sifatnya diperberat ataupun diringankan secara spesifik dalam rancangan.26

Berdasarkan sudut berapa kali tindakan guna menjadi sesuatu pantangan dapat dibedakannya antara kejahatan tunggal serta kejahatan berangkai. Kejahatan tunggal atau tindakan pidana tunggal merupakan kejahatan yang didefinisikan sedemikian rupa hingga pelaksanaan suatu perbuatan cukup dianggap selesai dan pelakunya dapat dihukum, mayoritas tindakan pidana dalam hukum pidana dilakukan dalam bentuk tindakan pidana tunggal. Kejahatan berantai atau tindak pidana berangkai saat ini dipahami sebagai kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelakunya harus melakukan berulang kali agar dianggap lengkap dan dapat dihukum. Tindakan pidana tunggal adalah delik tunggal, sedangkan tindakan pidana berangkai adalah delik yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

26 Bisbara Yavi Baskaran, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadah Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan”, Skripsi Sarjana Hukum, Bandarlampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, hlm.25, [http://digilib.unila.ac.id/57625/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.](http://digilib.unila.ac.id/57625/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)

### Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

* 1. Definisi Pemidanaan

Berbicara mengenai hukuman yaitu berbicara tentang manusia dan perjuangan mereka untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Sesuatu prosedur hukum berjenjang yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutaan, serta pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan diakhiri dengan divonisnya bersalah atau di bebaskanya terdakwa dari tindakan pidana tersebut. Semua persidangan pidana, terpidana menghadapi aparat penegakan hukum. Pemidanaan sudah melekat pada setiap masyarakat dan dimaaksudkan untuk mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan terhadap pelanggar hukum, termasuk dalam bentuk hukuman yang dilakukan orang tua kepada anak. Pemidanaan merupakan suatu sistem yang mencakup transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang diatur oleh aturan, bentuk pelaksanaanya serta kepada siapa dan untuk tujuan apa hukuman dikenanakan.27

Pemidanaan dalam hukum di Indonesia merupakan proses atau cara memberikan hukuman atau pidana kepada seorang yang melakukan sesuatu tindakan pidana. Hukuman merupakan definisi dari pemidanaan. Menurut Sudarto, pemidanaan timbul dari teks dasar hukum, sehingga dapat

27 Marulak Pardede, Dinamika Sistem Pemidanaan, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021, hlm. 54.

https://bpress.balitbangham.go.id/index.php/balitbangkumhampress/catalog/download/61/23/1150- 1?inline=1.

diartikan penetapan pidana atau menentukan pidana.28

Hukuman ialah sesuatu perbuatan yang dilaksanakan kepada seorang yang melangsungkan suatu kejahatan. Hukuman dirumuskan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan, namun untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatanya dan mencegah orang lain akan melakukan kejahatan serupa. Atas hal tersebut bahwa hukuman atau pemidanaan ini merupakan suatu perbuatan yang ditunjuk kepada pelaku suatu kejahatan, dan bukan dimaksudkan untuk membalas dendam kepada pelakunya, melainkan untuk memberikan bimbingan agar pelaku tidak mengulangi kejahatanya di kemudian hari.

Hukum pidana Indonesia biasanya mencakup tiga topik utama: jenis kejahatan, lamanya dipidana, dan pelaksanaanya pidana. KUHP yang mengatur asal primer hukum pidana menguraikan secara rinci jenis hukuman yang tercantum di pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Adapun tindakan Pidana lainya seperti perampasan hak khusus, perampasan barang khusus, serta pengumuman putusanya hakim.29

28 Rini Herlianti, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan”, Skripsi Sarjana Hukum, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023, hlm.33, https://repository.unja.ac.id/49800/1/DOC- 20230612-WA0018..pdf.

29 Syamsul Dwi Maarif, “Isi pasal 10 KUHP Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana”, *Tirto.id,* Jakarta,

30 September 2022, [https://tirto.id/isi-pasal-10-kuhp-tentang-jenis-jenis-tindak-pidana-gwK7,](https://tirto.id/isi-pasal-10-kuhp-tentang-jenis-jenis-tindak-pidana-gwK7)

diakses pada 23 Desember 2023, Pukul 12.45 wib.

* 1. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana dilaksanakan untuk mencapai harapan serta tujuan penjatuhan pidana, yaitu untuk meringankan keluhan kelompok sosial yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Mengenai tujuan penjatuhan pidana, ada sebagian ide yang dikemukakan dari beberapa ahli hukum, yang landasanya berdasar pada pertanyaan kenapa sesuatu tindakan kriminal dianggap sebagai tindakan pidana. Teori hukum pidana ini keterkaitanya dengan hukum pidana subyektif sebagai hak-hak ataupun kewewenangan untuk ditentukanya ataupun dijatuhkannya hukuman, bertentangan dengan definisi aturan norma positif ialah hukum pidana (hukum pidana obyektif). Atas hal itu, teori-teori berikut telah yang mengenai tujuan pemidanaan atau hukuman antara lain:.30

Berdasarkan teori absoluet, semua tindakan kriminal dapat dihukum dan tiada kejahatan yang dapat dilakukan tanpa diadili. Seseorang melakukan kejahatan dan dihukum, kemungkinan konsekuensi dari penerapan hukuman tidak di bahas. Tidak memprihatinkan apakah ada kemungkinan merugikan masyarakat, namun hanya dilihat dari masa lampau serta tidak dilihat masa yang akan datang.

Menurut teori Relatife suatu tindakan kriminal tidak serta merta harus mengikuti sesuatu kejahatan lain, oleh karena itu, kejahatan saja tidak cukup, manfaat hukuman bagi masyarakat dan pelaku juga harus

30 Usman, “Analisis Perkembngan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum,* 23 April 2019, Hlm.12,https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori- hukum-pidana.pdf.

dipertimbangkan. Tidak hanya melihat ke masa lalu, namun ke masa yang akan datang. Perlu adanya tujuan yang makin luas dan berjangka panjang dibandingkan sekadar melakukan hukuman saja. Adapun konsep ini dikenal dengan teori tujuan. Tujuan ini pertamanya harus ditunjukan supaya kejahatan yang dilakukan tidak terulang kembali dikemdian hari (pencegahan).

Terdapat dua pandangan yang berlawanan dalam teori dan ada pandangan ketiga. Adapun teori hukum pidana absoluet dan relatif, muncul pula teori hukum pidana yang ketiga, yang mengenaal unsur pencegahan yang melekat pada setiap kejahatan dan unsur rehabilitasi terhadap pelaku. Zeven Bergen mengklasifikasi dirinya ke dalam kelompok ketiga dan menyebut Belling, Bainding, Marcel sebagai tokoh dalam teori komprehensif ini.31

Rumusan teori tujuan penghukuman diatas sangat berguna dalam tingkat efektivitas organisasi pemidanaan. Tingkat efektivitas ditentukan oleh kemampuan organisasi pemidanaan dalam mencapai berbagai tujuan penjatuhan hukuman tanpa sesuatu tujuan dalam dijatuhkannya hukuman. Aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan saat menjatuhkan hukuman dan akan dijelaskan secara singkat tujuan hukuman. Menurut pendapat Sodarto tujuan pemidanaan secara umum dapat dibedakan menjadi balas dendam, retriibusi, dan pembalasan, namun dalam teori yang disebut absoluet,

31 Syarif Saddam Rivanie, et.al., “Perkembangan Teori dan Tujuan Pemidanaan”, *Law Review,* 6, 2, 2022, 176-188, https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4.

retribusi ditemukan sebagai tujuan pemidanaan.

Mempengaruhi perilaku masyarakat dalam rangka melindungi kelompok sosial yang seharusnya dilindungi. Hukuman tidak dijatuhkan atas kejahatan seorang diri, namun bertujuan yang lebih bermakna seperti melindungi masyarakat atau melindungi diri sendiri. Sebagaimana definisi diatas menunjukan bahwa tujuan penjatuhan hukuman berdasarkan rancangan KUHP berbeda dengan sudut pandang filsafat tertentu, yakni filsafat perkembangan (terapeutik). 32

Terkait dengan tujuan penjatuhan hukuman, para perumus Undang- Undang masa kini memahami pemidanaan menjadi fasilitas untuk tercapainya tujuan yang berguna bagi kelompok sosial serta perlindunganya. Tumbuh serta berkembangnya hukuman penjara sebagai suatu pemidanan, awal aturan perlakuan kepada terpidana dan tumbuhnya bangunan yang dibangun serta digunakan untuk mengumpulkan terpidana yang akhirnya disebut dengan sebutan bangunan penjara. Sebagai tempat ataupun wadah perawatan terpidana, itulah fungsi dari bangunan penjara, dengan kata lain bangunan penjara dapat dikatakan sebagai tempat yang menunjang sistem perlakuan terhadap narapidana.33

32 Florencia soleman, et.al., “Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Crimen,* 10, 7, 2021, 38, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/34996/32783.

33 Muhamad Fuadi Azizi, “Landasan Teoritis Pidana Penjara dan Tinjauannya dalam Hukum Adat”, Tesis Magister Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.9, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9083/MUHAMMAD%20FUADI%20AZIZI.p df?sequence=1&isAllowed=y.

Hukuman menjadi perhatian utama ketika mereformasi hukum pidana, dan hal ini menyangkut pengembangan teori tujuan pidana. Tujuan pemidanaan di Indonesia didasarkan pada kerangka teori yang menekankan pentingnya keseimbangan, keselarasan, dan kesesuain sosial dan masyarakat, yang sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bersumber atas hal tersebut, bisa dijelaskan bahwa konsep tujuan penjatuhan hukuman integrtif ialah gabungan dari beberapa konsep tujuan penjatuhan hukuman yang dilihat lebih selaras dilaksanakan di Indonesia. Pendekatan hukum filosofis didasarkan pada premis dasar bahwa kejahatan merusak keseimbangan, keharmonisan dan kehidupan sosial. Tujuan hukuman yaitu untuk menyerahkan kompensasi atas ruginya pribadi dan sosial yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Pada hakikatnya tujuan pidana dari setiap aliran atau doktrin hanyalah sekedar rincian perlindungan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya untuk mencapai tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat.34

Mensosialisasikan narapidana melalui pelatihan serta membimbing supaya menjadikan manusia yang baik serta bermanfaat, penyelesaian masalah karena kejahatan, dipulihkan keseimbangannya dalam masyarakat, menciptakan perasaan tentram serta damai, serta menumbuhan rasa penyesalan. Pasal 52 hukuman tidak boleh ditunjuk untuk

34 Muhamad Gifari Setianto, “Pidana Pengawasan dalam RKUHP di Tinjauan dari Tujuan Pemidanaan Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum, Pasundan: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2021, hlm. 50, [http://repository.unpas.ac.id/55407/3/8.%20BAB%202.pdf.](http://repository.unpas.ac.id/55407/3/8.%20BAB%202.pdf)

merendahkan martabat manusia. Pasal 51 dan 52 RUU KUHP Nasional Tahun 2019, dapat melihat bahwa tujuan pertama yaitu untuk melindungi masyarakat. Tujuan kedua adalah merehabilitasi narapidana ke dalam masyarakat. kemudian tujuan ketiganya makin selaras dengan konsep aturan adat yaitu bertujuan supaya memperbaiki dan dipulihkan keseimbangannya yang terusik oleh perbuatan yang bertentangan dengan aturan adat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku diharapkan bisa terselesaikan permasalahannya dan perselisihan serta menciptakan kedamaian untuk kelompok sosial. Tujuan ke-empat makin sifatnya spiritual dan tercerminkan nilai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 52, hal ini berarti bahwa hukuman, meskipun pada prinsipnya menimbulkan rasa sakit, tidak bertujuuan untuk merendahkan martabat manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, pembentukan tujuan pidana bertumpu pada keseimbangan perlindungan antara kesejahteraan masyarakat dan kepentingan individu.35

Konsep yang timbul bersama dengan pandangan hukum pidana tidak berupaya menelusuri landasan hukum ataupun pembenaran terhadap hukum pidana. Fokusnya adalah pada pengembangan sistem peradilan pidana yang praktis dan efektif. Adapun yang dimaksud dengan “berguna” disini dalam arti luas ialah tidak saja berguna untuk kelompok sosial serta pelaku kriminal, namun juga berguna bagi korban kriminal. Sebaliknya, “Praktis” berarti hukum pidana tidak memerlukan prosedur yang terlalu

panjang, tetapi mudah ditegakan, dan tidak melanggar asas hukum yang berlaku.

* 1. Jenis-Jenis Pemidanaan

Sebagaimana di dalam ketentuan KUHP tentang pidana mengenai hukuman dan jenis pidananya meliputi dua jenis pidana, ialah hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hukuman terdiri dari pidana pokok yakni hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan membayar denda. Sanksi selanjutnya yaitu hukuman tambahan terdiri atas perampasan hak khusus, penyitaan properti khusus, serta pengumuman putusanya hakim.36

Hukuman pidana primer ialah hukuman yang dikenakan secara terpisah dari hukuman lainya. Adapun hukuman tambahan ialah hukuman yang hanya dapat dikenakan bersamaan dengan hukuman pokok. Hukuman mati termasuk dalam kategori kejahatan berat sebagaimana tercantum di Pasal 10 KUHP.

Seiring berjalannya waktu dampaknya dirasakan telah menyalahgunakan kebebasan-kebebasan dasar, khususnya kebebasan untuk berjiwa seperti mana disinggung di Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “seorang mempunyai pilihan untuk berjiwa serta hak untuk menjaga nyawa serta jiwanya." Hukuman kematian dikecualikan sebagai hukuman pokok dalam gagasan penjatuhan hukuman dalam

KUHP. Hukuman yang berat ialah kurungan, tutup, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Pidana mati ialah suatu jenis sanksi pidana yang unik dan istimewa, kebanyakan dijatuhkan dengan alternatif. Pidana kematian ialah pidana berat yang di jatuhkan untuk kejahatan serta dapat dijatuhkan, serta dilaksanakan untuk tindakan kriminal yang sangat jahat.

Adapun sanksi penjara ialah salah jenis sanksi atau hukuman kejahatan dengan kata lain disebut juga dengan pidana kemerdekaanya dicabut atau pidana pemasyarakatan. Bagi seorang yang melakukan tindak pidana, penjara dilihat sebagai suatu wadah pencegahan. Penjara merupakan semacam jenis sanksi yang direncanakan untuk penjahat.

Selanjutnya Pidana kurungan merupakan sanksi hukum yang membatasi kesempatan terpidana untuk bergerak. Pidana kurungan dilaksanakan melalui cara diwajibkannya individu yang berkaitan untuk mematuhi setiap aturan dan pedoman yang berfungsi di institusi masyarakatan, dan aturan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang, selanjutnya melalui kegiatan pendisiplinan. Perintah Pengadilan akan dikeluarkan terhadap siapa pun yang melanggar aturan ini. Hukuman pengurungan sama halnya hukuman penjara ialah dirampasnya kebebasan seorang terpidana melalui cara dikurungnya keluasan bergerak di dalam institusi masyarakat, adapun maksud supaya terpidana mempunyai cara pandang serta tingkah laku jauh makin baik serta tidak terulangi

tindakannya di masa yang akan datang.37

Pemidanaan Indonesia selanjutnya yaitu pidana denda, ialah sesuatu macam sanksi hukuman yang paling banyak dikenal karena mengabaikan pengaturan aturan pidana yang berlaku. Denda ialah sesuatu jenis kejahatan yang paling umum yang merugikan penjahat, khususnya sumber daya atau properti mereka. Denda ialah bentuk pelanggaran yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sepenuhnya bertujuan untuk membebankan seorang yang menentang ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mewajibkan untuk seorang tersebut membayarkan jumlah dana ataupun digunakannya sumber daya sebanding dengan apa yang ditentukannya.38

Selain pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 a dan 6 a KUHP, termuat hukuman pokok berbentuk hukuman kurungan, yang digantikannya hukuman penjara tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 mencakup, apabila pelaku pidana diadili, diancamnya hukuman penjara dilatarbelakangi oleh dukungan yang layak mendapat perhatian, ketua sidang yang ditunjuk bisa memberikan hukuman.39 Penahanan ialah bentuk pelanggaran yang diberlakukan penahanan semasa hidup ataupun masa yang telah ditentukan dipenjara. sanksi yang paling terbatas ialah 1 hari,

37 Maya Shafira, et.al., “Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier”, Bandarlampung: Pusaka Media, 2022, hlm. 46,

<http://repository.lppm.unila.ac.id/49968/1/BUKU%20HUKUM%20PEMASYARAKATAN%20D> AN%20PENITENSIER.pdf.

38 Ibid.

39 Marpaung, “Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan PidanaTutupan”, *Reformasi Hukum*, 24 (1), 2022, hlm. 97-113, https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/81/55/.

serta paling lama ialah 15 tahun, dan apabila ketua sidang perlu memutuskan hukuman kematian atau hukuman semasa hidup, pejabat yang ditunjuk bisa memberikan sanksi dua puluh tahun kurungan. Batasan jangka panjang tersebut terlampaui karena adanya hukuman yang lebih serentak, diulang-ulang, atau karena masih terdapat dipasal 52 hukuman penjara untuk jangka waktunya khusus tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.40

Adapun tindak pidana yang mengakibatkan bertambahnya hukuman secara keseluruhan disebut hukuman tambahan. sanksi tambah merupakan sanksi fakulttif, berartikan bisa diberikan namun tidak mewajibkannya. sanksi tambahannya menurut konsep tidak bisa diberlakukannya tanpa sanksi utama dikarenakan hanya ditambahkannya pada situasi primer. Alasan adanya peraturan tambahan ialah untuk menambahnya sanksi asal hingga tidak bisa diterapkannya seorang diri dan terdapat pengecualiannya dalam sebagian persoalan.41

Hukuman tambah tidaklah bisa dipaksakan tanpa hukuman utama, dengan maksud lainnya hukuman tambah tidaklah bisa dikenakan tanpa hadirnya hukuman yang utama. hukuman tambah dibagi menjadi 3 klasifikasi yaiitu menghilangnya hak-hak terkhusus, disitannya barang khusus serta pengumuman terbuka sehubungan dengan putusan ketua persidangan. Adapun beberapa hak yang dicabut merupakan suatu sanksi

40 Ibid.

41 Mulatua, et.al., “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11, 1, 2019 hlm.69, [http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142/127.](http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142/127)

tambahan yang diberikan untuk terpidana sebagai langkah untuk melenyapkan dan merampasnya kewenangan khusus dari seorang yang sudah dibuktikan salah melangsungkan tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 KUHP diaturnya mengenai kewenangan yang bisa diambil dalam klasifikasi sanksi tambahannya yaitu kewenangan untuk menempati jabatan umum ataupun jabatan terkhusus dalam militer, kewenangan untuk berkoalisi dengan pasukan bersenjata, kewenangan untuk memilihnya serta terpilihnya dalam seleksi yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkannya, kewenangan untuk berbuat menjadi pengacara ataupun berdasarkan penetapannya majelis hukum, menjadi orang tua, pengontrol, ataupun mengawasi sebagai sesorang lain, kewenangan untuk dijalankannya kedaulatan yang ditinggalkan dari ayahnya, seperti perwaliannya dan hak asuh anaknya, dan kewenangan untuk menjalankan usaha tersendiri.

Adapun dalam Pasal 38 (1) KUHP diaturnya prosedur penentuan jangka waktu penarikan wewenang yaitu apabila sesuatu kewenangan ditarik, ketua sidang bisa menentukan lamanya penarikanya. Maksimal hukuman penarikan tanpa batas waktu ialah pidana kematian ataupun pidana kurungan semasa hidup. Dalam hal pidana penjara atau hukuman pemenjaraannya dalam masa tersendiri, jangka waktu penarikan minimal 2 tahun serta maksimal 5 tahun dari sanksi utama. Sanksi dendanya dapat ditaguhkan minimal 2 tahun serta maksimal 2 tahun.42

42 Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya penyitaan sesuatu benda khusus yakni sebagian dari tindakan pidana tambahan yang ditetapkannya oleh ketua pengadilan untuk dihilangkannya hak kepemilikan properti tersebut, serta hasil penyitaan disimpan kepada pemerintah. Pemerintah selanjutnya akan mengambil tindakan lebih jauh terhadap benda terlarang, semacam dilelang ataupun dimusnahkan. Apabila benda tersebut mempunyai harga serta legal, maka berkenaan di lelang, namun apabila benda tersebut membahayakan ataupun ilegal, benda dapat dihancurkan.

Barang yang dapat disita ada dua macam, yaitu barang milik pelaku tindakan pidana serta barang yang sengaja digunakan untuk dilakukannya tindakan pidana. Pidana tambahan selanjutnya adalah pengumuman keputusan hakim. Apabila seorang hakim memerintahkan agar suatu putusan diumumkan berdasarkan hukum pidana ataupun peraturan lainnya, maka hakim perlu menentukan prosedur pelaksanaannya putusan itu atas beban terdakwa. Ada sebagian situasi dimana putusan hakim disebarluaskan, termasuk melewati tv, perangkat cetak, perangkat online, dan perangkat sosial, dan dimana Undang-Undang membatasi penyiaran putusan hakim kepada publik dan semua keputusannya dilafalkan secara tidak tertutup.

hukuman bersyarat atau sanksi bersyarat merupakan metode penjatuhan serta penegakan pidana yang diberikan oleh majelis hukum, namun pernyataan bersyarat ini hanya terjadi pada dalam kondisi tertentu. Hukuman bersyarat merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah

yang tujuannya untuk memberikan kesempatannya terhadap pelanggar untuk diperbaikinya diri sendiri dan menghindari dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang.43 Selanjutnya pidana pengawasan yang merupakan pidana alternatif berupa pidana penjara bersyarat, adanya persyaratan (sehubungan dengan hukuman penjara) untuk tidak melakukan tindakan pidana dalam waktu percobaannya sampai dengan tiga tahun dengan batasan-batasan tertentu. Adapun hukuman selanjutnya yaitu hukuman pekerja sosial merupakan hukuman pekerjaan sosial yang berasal dari Eropa, dimana putusan hakim menunjukan bahwa pelakunya dijatuhi hukuman kerja untuk menghindari tindak pidana perampasan kemerdekaan.44

Dalam sistem pidana Indonesia, hukuman dibedakan menjadi dua kategori: hukuman pokok dan hukuman tambahan. hukuman pokok termasuk dipenjarakan , tutupan, diawasinya, dan kerja sosial. Sanksi lainya antara lain perampasan kewenangan terkhusus, penyitaan benda, pengumuman putusannya pengadilan, membayarkan kerugian, pembatalan persetujuan terkhusus dan dipenuhkanya kewajibann daerah.

### Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

* 1. Definisi Tindak Pidana Pengeroyokan

Kata *deeleneming* berasal dari kata *deelenemen* (Belanda) yang berarti kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi “penyertaan”.

43 Sapto Handoyo, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, 4, 1, 2018, hlm. 26, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/782/665.

44 Maya Shafira, Loc.cit..

Secara garis besar, kata dukungan dapat diartikan sebagai tindakan atau tindakan kriminal yang dilaksanakan lebih dari satu seorang. Apabila seseorang melangsungkan tindak pidana, lalu yang dimaksud dengan “partisipasi” (deelneming) adalah keterlibatan satu orang atau lebih. Keterlibatan tercantum dalam buku 2 bagian 5 pasalnya 170 KUHP. Keterlibatan merupakan kejadian kriminal dimana beberapa kelompok atau setidaknya bersama seseorang ikut serta dalam sesuatu perbuatan jahat serta perbuatan pelanggar hukum yang dapat bervariasi. Para ahli mengatakan bahwa deelneming adalah sebagai berikut:45

Beberapa Pendapat para ahli yang pertama yaitu Chazawi, mengatakan bahwa mencakup seluruh bentuk keikutsertaannya ataupun keterlibatannya seseorang, bisa secara psikisnya maupun fisiknya dengan dilakukannya suatu tindakan hingga munculah sesuatu tindakan pidana. Pendapat ahli selanjutnya yaitu Wirjono Prodjodikoro juga mengatakan bahwa setidaknya ada satu orang yang ikut serta ketika orang lain melakukan kesalahan. Atas dasar pendapat ahli, bisa disimpulkannya bahwasanya pengertian tindakan pidana pengeroyokan merupakan tindakan pidana yang apabila dilaksanakan lebih dari satu individu, tercantum diatur di Pasal 170 KUHP.46

45 Alfitra, Modus Alperandi Pidana Khusus diluar KUHP, Jakarta: Asa Sukses, 2014, hlm 119.

46 Ike Endra Agus Setiowati, et al., “Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Perkosa Anak”, *Media Luris,* 1, 2, 6, 2018, hlm. 284,

https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/8831/5052/28809.

Tindakan pidana pengeroyokan ialah tindakan pelanggaran hukum yang meliputi saling melakukan tindakan keji terhadap individu atau harta benda. Perbuatan tersebut tidak mengindahkan pedoman hukum yang terdapat di dalam pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwasannya setiap seseorang yang terang-terangan melangsungkan kekerasan terhadap orang pribadi atau harta benda, dapat dihukum dengan pidananya penjara paling lama 5, 6 tahun. Pelakunya dihukum dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, bila ia dengan sengajanya merusak harta benda atau tindakan yang dilakukannya menimbulkan kerugian dan hukumanya penjara paling lama 9 tahun, apabila kejahatan menimbulkan kerugian besar yang berat dan penahanan terbesar selama 12 tahun. , dengan tindakan kekerasannya tersebut berakibat meninggalnya seseorang.

Menurut Pasal 89 KUHP perlu dimaknai komponen-komponen yang terkandung dalam aturan ini sebagaimana komponen siapanya, dimana menyinggung seorang perseorangan ataupun perorangan sebagai pelakunya. Berada dimuka umum, tindakan dapat dilangsungkan dimana masyarakat umum bisa melihatnya. Bersamanya yang mengartikan tindakan ini dilangsungkan dua orang paling minimal.47

Makna dari kata-kata tersebut secara bersama menunjukkannya bahwa tindakan itu dilangsungkan dengan ketersengajaan (delik dollus) ataupun mempunyai alasan sangat jelas, sehingga tidaklah suatu

47 Chaidir Ali Basir, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang dan Barang Dimuka Umum”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 33. https://docplayer.info/235094349-Metadata-citation-and-similar-papers- at-core-ac-uk-skripsi.html.

kecelakaan (delik cullpa). kekerasannya, artinya memanfaatkan tenaganya ataupun kekuatannya dengan nyata yang tidak sedikit. Perbuatan ini biasanya mencakup "merugikan properti" atau kejahatan terhadap individu atau properti. Orang atau harta benda yang menjadi korban sasaran kekerasan.

Pengeroyokan adalah salah satu jenis kejahatan yang diawasi secara ketat oleh Undang-Undang karena sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan oleh masyarakat. Faktanya, hampir setiap hari, berita dan internet penuh dengan cerita mengenai pengeroyokan. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan salah yang kadang kala terjadinya dalam kehidupan kseharian. Perbuatan kriminal atau bisa disebut bagaikan tindakan kriminal yang sangat merugikan kelompok sosial. kebanyakannya, tindakan kriminal ini sangat seringnya dilangsungkan oleh lingkungan sekitar dengan melakukannya beragam macam kejahatan, bisa fisiknya, mental, dan lainnya.48

* 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Sesuatu perbuatan pelanggaran hukum bisa digolongkan seperti tindakan kejahatan yang dimana semuanya melakukan kejahatan dimuka umum, maka harus memenuhi unsur-unsur yaitu maksud dari dilakukanya perbuatan itu ialah kekerasann yang dipergunakan untuk

48 Muhammad Ansari, Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penganiayaan Berat*,*Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2022,[http://eprints.uniskabjm.ac.id/9937/1/ARTIKEL\_MUHAMMADANSARI.pdf.](http://eprints.uniskabjm.ac.id/9937/1/ARTIKEL_MUHAMMADANSARI.pdf)

menggambarkannya suatu tingkah laku, bisa terbuka ataupun tertutup serta penggunaan tenaga terhadap orang lain yang bersifat serang atau menahan. Menurut Thomas Susanto, ada empat kategori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk kekerasan. Pertama adalah kekerasan terbuka, yaitu perbuatan yang dilangsungkan oleh seorang ataupun sebagian kelompok yang dilihatkan secara nyata didepan masyarakat umum, seperti tawuran antar siswa. Selanjutnya yang kedua ada kekerasan tertutup, adalah perbuatan yang dilangsungkan secara tertutup ataupun tidak dilangsungkan secara nyata. Publik tidaklah mengetahui dilangsungkannya suatu kekerasan berjenis ini. Kekerasan berjenis ini lebih dilihatkan pada psikologis korban semacam tingkah laku yang mengancamnya.

Kekerasan ketiga yaitu kekerasan agresife, adalah kekerasan yang dilangsungkan tidak untuk melindunginya, namun untuk didapatkannya sesuatu. Kekerasan yang terakhir yaitu kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilangsungkan bagaikan perbuatan, melindungi perseorangan. Kekerasan agresife ini ataupun kekerasan defensife bisa bersifat terbuka serta tersembunyi.49

Pasal 89 KUHP diartikan bahwa penggunaan kekerasan secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan fisik yang sebesar-

49 Rouliati Marehanda,“*Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (pengeroyokan) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018, hlm 21, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8227/MjA5MTc=/Kajian-yuridis-implementasi-pasal- 170-ayat-2-ke-1-kuhp-tentang-tindak-pidana-dengan-tenaga-bersama-melakukan-kekerasan- terhadap-orang-pengeroyokan-studi-kasus-di-Pengadilan-Negeri-Boyolali-rouliati.pdf

besarnya, sehingga seorang yang menjadi korban kekerasannya menjadi terluka berakibat kekerasan tersebut. Definisi kekerasan di Pasal 170 Ayat 1 KUHP berbeda dengan definisi kekerasan dalam Pasal 89 KUHP, Pasal 170 Ayat 3 KUHP menerangkan Pasal 89 KUHP tidak berlaku, perbedaanya terlihat pada masing-masing objeknya. Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwasanya yang menjadikan obyek penggunaan kekerasan kepada orang yang berakibat tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Sebaliknya, objek yang menjadi dasar definisi kekerasan dalam Pasal 170 KUHP tidak saja mencakup seorang, namun lebih luas dan juga objek yang dapat dikenakan kekerasan, seperti penggunaannya peralatan dalam melakukan tindakan pidana kekerasan tersebut.50

Berdasarkan para ahlinya tentang tindakan kekerasan dalam ditegakannya hukum yang menjadikan alasan penetapan pasal yang dijatuhkan oleh tindakan kriminal yang dilangsungkan oleh pelakunya. Seperti yang dikatakan Soesilo, lebih spesifiknya: melangsungkan kekerasan berarti dipergunakan tenaganya ataupun kekuatannya yang sebenarnya, contohnya memukulnya dengan kekerasan ataupun dengan berbagai ragam senjata, menendangnya, dan lainya. Menyelesaikan kejahatan di dalam pasal ini bukanlah sesuatu peralatan ataupun usaha teruntuk tercapainya sesuatu semacam yang terjadi pada Pasal 146, 211,

212 serta lainnya dalam KUHP. Hal ini tidak dapat mengecualikan pelanggaran berdasarkan Pasal 489 KUHP, menganiaya berdasarkan

50 Ibid, hlm 23.

Pasal 351 KUHP serta diperusaknya properti berdasarkan Pasal 406 KUHP, dan lainya.51

* 1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pengeroyokan

Bentuk-bentuk tindakan pidana pengeroyokan dalam aturan pidana adalah orang-orang yang melakukannya (Pelaksana Pencipta: Pleger), dan orang-orang yang meminta agar dilakukan (Pencipta: Doen Pleger), orang-orang yang turut serta melakukannya atau ikut serta (Pencipta: Medepleger), bersama individu yang dengan sengaja mendukungnya (Konstruktor: Uitlokker). Pasal 55 dan 56 merinci jenis penyertaan dan memberikan penjelasanya. Pasal 55 menyangkut klasifikasi yang disebut *mededader* dan Pasal 56 menyangkut *medeplichtige* (mitra). Menurut Pasal 55, yang melakukan tindak pidana dipidana sebagai pelaku, baik yang mengarahkan, maupun yang turut serta di dalamnya. Seseorang yang secara sadar mendorong perilaku orang lain dengan memberikannya ataupun menjanjikannya, dengan disalahgunakan kekuasaan ataupun martabatnya, dengan kekerasan serta ancamannya ataupun menyesatkan, dengan memberikan peluang, prasarana ataupun informasi. Sedangkan didalam Pasal 56 merumuskan pidana sebagai pembantu tindakan kejahatan, yaitu seorang yang dengan ketersengajaan membantu dilakukanya suatu kejahatan, dan seorang

51 Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Bogor: Politeia, 2013, hlm 98. https://lin.ui.ac.id/detail?=20106450&lokasi=lokal.

yang dengan ketersengajaanya juga memberikannya peluang, sarana, ataupun keterangan untuk dilakukanya suatu kriminal. Hukum pidana di keseluruhan dunia secara umum tidak mengatur mengenai kesanggupan untuk dimintai pertanggungjawaban, melainkan sebaliknya, yakni ketidakmampuan untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam pasal 44 KUHP.

* 1. Pengaturan Tindak Pidana Pengeroyokan

Hukum bukan hanya sekedar meminta kenyamanan, selebihnya hukum dapatlah memberikannya suatu rasa adil kepada kelompok sosial. Hukum sendiri tidak dapat sendirinya akan memunculkan keadilan, namun untuk dicapainya suatu keadilannya hukum haruslah ditegakkannya.52 Menegakan norma yang memiliki nilai yang baik merupakan keterkaitan diantara poin-poin dan kaidah ataupun dengan tingkah laku yang sebenarnya.

Atas dasarnya regulasi berkepentingan untuk menjamin terselenggaranya aktivitas publik masyarakat, karena regulasi dan masyarakat saling berkaitan. Ada tiga buku dalam KUHP yang masing-masing memuat tiga aturan berbeda. Pada buku 1 mengenai aturan pidana umum, mengenai pidana kejahatan terdapat pada buku 2, mengatur tentang dalam Buku 3 terkait Pidana Pelanggaran. Kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dianggap

52 Haryanto Ginting, et.al, “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”, *Fakultas Hukum Universitas Medan Area,* 5, (1), 2018.

mengandung makna bahwa pokok tindakan tersebut adalah diganggunya ketertiban publik hingga dapatlah dengan dibuktikannya bahwa perbuatan yang dilangsungkan untuk dibuatnya keadaan yang beresiko.

Alasan utama Pasal 170 adalah hasil perbuatan yang memakai kekeraasan secara bersama-sama.53 Lembaga kepolisian merupakan metode hukum nasional institusi penegakan hukum, terkhususnya di bagian hukum kepidanaan. Berdsarkan KUHP, Kepolisian ialah aparat penegakan hukum yang berhubungan secara langsung dengan kelompok sosial melalui penyidikan.

Proses ditegakkannya hukum dimulai dari tahap permohonan dan pemeriksaan, yang setelahnya berlanjut ke tahapan dakwaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima serta diperiksanya berkas perkara penyidikan dari kepolisian penyidik ataupun penyidik yang membantu. Kemudian memperoleh berkas perkaranya, pemeriksa wajib melakukan pra penuntutan jika terdapat kurang lengkapnya pada berkas penyidikannya oleh penyidik, dengan memberikan pedoman serta petunjuk hal yang mesti mendapatkan penyempurnaannya di dalam dokumen penyidikan dari penyidik kepolisian, selanjutnya dokumen

53 Kartika Law Firm, “Isi Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan & Apa Ancaman Pidananya?”, *Kartikanews.com,* Jakarta, 13 Desember 2018, [https://kartikanews.com/isi-](https://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya/) [pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya/,](https://kartikanews.com/isi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokan-apa-ancaman-pidananya/) diakses pada 23 November 2023, Pukul 19.00 wib.

perkaranya yang sudah di terima dari penyidik dan telah dinyatakan kesempurnaanya, setelahnya yaitu Jaksa Penuntut Umum haruslah membuatkan surat dakwaannya yang telah selesai dan selanjutnya dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan yang dimana dilakukanya tahapan pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.54

Perkaranya dihentikan pada tingkat pemeriksaan atau tidak dipindahkan ke Jaksa oleh pihak kepolisian. Polisi memiliki kedudukan untuk menghentikannya pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena 3 alasan, yakni perkaranya yang sedang ditangani bukanlah suatu perbuatan tindakan pidana dan kurangnya bukti-bukti serta, kepolisian memiliki wewenangnya mengingat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan bahwasanya demi kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melangsungkan kewajiban serta kewenangnya dapat melangkah sesuai pertimbangan dirinya. Selain itu, melaksanaan pengaturan sama dengan dimaksud pada ayat 1, hanya dilangsungkan dalam kondisi yang sangatlah penting melihat berpedoman pada pedoman hukum serta aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

54 Haryanto Ginting, Op.cit, hlm 38.